

STUDI PERBANDINGAN KESIAPAN PENERAPAN *SMART VILLAGE* BERBASIS WEBSITE PADA DESA MARGOTOTO DAN DESA MARGOSARI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Aderia Ernanda^{1*} & Kris Ari Suryandari²

^{1,2}Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

*Jl. Sumantri Brodjonegoro No. 1, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia

*Korespondensi: aderiaern883@gmail.com

Received: 17/4/2025 | Revised: 13/6/2025 | Accepted: 15/6/2025

Abstract

Smart Village is a program specifically designed for village governments to keep pace with the rapidly advancing technology. The aim is to assist village governments, particularly in providing services to the community more effectively and efficiently by utilizing information technology. However, in its implementation, there are still instances of unpreparedness among village governments in executing the Smart Village program, particularly evident in the lack of resources. Therefore, this research aims to assess the readiness for the implementation of Smart Village in the village governments of Margototo and Margosari, viewed from two perspectives: the village government and the community. This study employs qualitative research with a comparative approach, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. Informants were selected using purposive sampling to identify key informants. A total of 14 informants were interviewed to determine the readiness for the implementation of Smart Village, including officials and community members from both Margototo and Margosari villages. The results indicate that, based on six indicators of E-Readiness, the Margototo village government is only prepared in one indicator, which is the availability of technological infrastructure. In contrast, the Margosari village government is prepared in four out of the six indicators, namely Data Systems, Human Resources, Technological Infrastructure, and Leadership with strategic thinking.

Keywords: *readiness, smart village, village government*

Abstrak

Smart Village merupakan program yang dibentuk khusus untuk Pemerintah Desa dalam mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hal ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Desa terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun, pada pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksiapan Pemerintah Desa dalam menjalankan program *Smart Village* ketidaksiapan terlihat terutama dari kurangnya Sumber Daya, sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan penerapan *Smart Village* pada Pemerintahan Desa di Desa Margototo dan Desa Margosari yang dilihat dari dua sisi yaitu Pemerintah Desa dan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif, dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan kunci. Terdapat 14 informan yang diwawancarai untuk mengetahui Kesiapan Penerapan *Smart Village* yaitu Aparatur dan masyarakat Desa Margototo serta Aparatur dan masyarakat Desa Margosari. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 6 indikator *E-Readiness* Pemerintah Desa Margototo hanya siap pada 1 indikator yaitu tersedianya infrastruktur teknologi sedangkan pada Pemerintah Desa Margosari dari 6 indikator yang ada hanya siap pada 4 indikator yaitu Sistem Data, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Teknologi dan Kepemimpinan serta pemikiran yang strategis.

Kata kunci: kesiapan, *smart village*, pemerintah desa

PENDAHULUAN

Penerapan teknologi informasi yang seharusnya menjadi suatu landasan bergengsi abad ini justru masih banyak ditemukan pada tiap-tiap provinsi di Indonesia yang belum maksimal. Pasalnya, sosialisasi pemerintah kepada masyarakat yang dipimpin belum bisa dileburkan secara komprehensif dan transparan. Dalam sektor pemerintahan sendiri, beberapa diantaranya belum memanfaatkan kemajemukan perkembangan teknologi informasi hingga berdampak pada kelayakan pelayanan publik informasi yang belum merata untuk masyarakat. Dalam hal ini, penerapan teknologi informasi atas pelayanan publik disebut dengan istilah *E-Government*.

Membicarakan *E-Government*, itu artinya tidak hanya merefleksikan ditingkat pemerintah pusat saja. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang desa mengharuskan memiliki Sistem Informasi Desa (SID), sehingga penyelenggaraan pemerintah desa tidak bisa menghindari dari kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi. Pemerintah Desa diharapkan mampu menyelaraskan dengan perkembangan tersebut dalam menjalankan organisasinya. Dengan demikian, kesiapan dari organisasi perlu diperhatikan dalam pengembangan *E-Government* (Nugroho, 2020). Pada skala pemerintah desa penyebutan *E-Government* disesuaikan dengan sebutan program *Smart Village*. *Smart Village* merupakan program yang tercantum dalam Peraturan Gubernur No 18 Tahun 2021 tentang Desa Berjaya yang memiliki beberapa program salah satunya adalah program *Smart Village*.

Di Provinsi Lampung pada tahun 2020 merupakan awal pelaksanaan program *Smart Village* di 30 desa sebagai desa sasaran yang dianggap mampu melaksanakan program tersebut berdasarkan dari indeks desa. Di tahun berikutnya seluruh desa yang memiliki indeks desa dengan penilaian “Maju” diharapkan dapat melaksanakan program *Smart Village* namun realitanya pelaksanaan program *Smart Village* nampak kurangnya persiapan yang baik, terutama dalam pengelolaan *website* desa yang banyak terhenti ditengah jalan akibat kurangnya sumber daya sehingga pelaksanaan program *Smart Village* ditemukan kurangnya progetivitas yang komprehensif sebab, pada realisasi tahap pertama dan kedua sering terhenti yang mana pada tahap tersebut *website* desa hanya berperan sebagai informasi desa belum adanya komunikasi dua arah atau dapat dikatakan belum mencapai tahap pemanfaatan *website* dalam membantu memberikan kemudahan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini juga terjadi pada Desa Margototo dan Desa Margosari yang merupakan dua desa diluar 30 Desa yang ditetapkan menjadi daerah fokus penerapan *Smart Village* yang berupaya untuk mempersiapkan program ini dapat dijalankan pada masing-masing desa. Implementasi *Smart Village* pada Pemerintah Desa Margototo ditemukan kurangnya progetivitas, hal ini nampak pada rencana Pemerintah Desa mempersiapkan pelayanan secara digital, yaitu merencanakan segala kegiatan pelayanan dapat dilakukan dengan memindai kode QR (*Quick Response*) atau hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga, segala kegiatan surat menyurat dapat dengan mudah untuk dilayani secara *virtual* melalui *website* desa yang dimiliki. Namun, hal tersebut belum dapat terealisasikan karena terkendala penginputan data yang belum terkumpul dari setiap dusun di Desa Margototo. Hal ini diduga karena lalainya aparat desa dalam proses pengumpulan data masyarakat, dan hal ini juga diduga berdampak pada *website* Desa Margototo yang nampak kurang informatif. Dikatakan demikian karena data yang disajikan tidak begitu lengkap, dan tidak ditopang dengan data keuangan desa. Data jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan data desa, dan tidak adanya *update* kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Hal berbeda ditemukan pada desa Margosari yang mempersiapkan tim khusus guna menciptakan pelayanan secara digital. Dari pembentukan tim khusus tersebut yang dipilih dari Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes), sedikitnya tiga orang yang direkrut menjadi tim khusus ini. Namun, dalam realisasinya masih terkendala dengan anggaran—sehingga, pelayanan secara *online* melalui *website* desa Margosari belum bisa direalisasikan. Jika dibandingkan, *website* desa Margosari realitif lebih berkembang. Hal ini diklaim berdasarkan pantauan penulis melihat dengan beberapa data pada informasi yang disuguhkan melalui *website* yang lebih lengkap; seperti adanya data penggunaan dana desa, jumlah dana desa, jumlah kependudukan, profil sejarah, berita terkini desa, dan *update* kegiatan desa yang dilakukan pemerintah desa. Berdasarkan

penjabaran tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan penerapan *Smart Village* pada pemerintah desa Margototo dan Desa Margosari.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu dilakukan oleh Hiro Isman (2019) terkait penerapan *Smart Village* pada Pemerintah Desa bahwa terdapat beberapa desa yang termasuk dalam 30 desa lokus mengalami kesulitan untuk menerapkan terutama dalam pengembangan *website* yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang hanya sebatas SMA/Sederajat sehingga pengoperasian *website* terbatas dan hal ini mempengaruhi kesiapan penerapan *Smart Village* pada tingkat desa

Pada penelitian Bambang Kurniawan (2021) membahas kesiapan pemerintah dalam penerapan *Smart Village* pada Pemerintah Desa di Provinsi Lampung dan berfokus pada daerah *Pilot Project Smart Village*. banyaknya penelitian yang membahas kesiapan penerapan *Smart Village* hanya berfokus pada 30 lokus desa yang sudah ditetapkan sedangkan diluar itu terdapat desa lain yang juga berupaya menerapkan seperti pada Desa Margototo dan Desa Margosari.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif dan juga secara komparatif menganalisis kesiapan penerapan *Smart Village* yang berfokus pada upaya pengembangan pelayanan melalui portal *website* desa. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Margototo dan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya dilakukan juga penetapan informan yang dianggap memahami terkait penelitian ini diantaranya adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Operator desa dan tim pengelola *website* serta masyarakat di Desa Margototo dan Desa Margosari.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini yakni kesiapan penerapan *Smart Village* pada Pemerintah Desa, selanjutnya dilakukan juga analisis data menurut Noeng Muhadjir (2000) yaitu dengan cara mereduksi data yang diperoleh dan memfokuskan pada tema penelitian, menyajikan sebagai hasil temuan, dan menarik kesimpulan.

25

HASIL DAN PEMBAHASAN

Smart Village merupakan program yang dibentuk untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi sehingga menjadikan desa menjadi desa cerdas dan membantu dalam pengembangan inovasi pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien dengan fasilitas portal *website*. Di Provinsi Lampung acuan dasar pelaksanaan *Smart Village* adalah Peraturan Gubernur No 18 Tahun 2021 tentang Desa berjaya. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa secara umum Desa Berjaya adalah untuk mengintegrasikan program- program Desa Tertinggal, *Smart Village*, pengembangan perdesaan, dan pengembangan kawasan transmigrasi. Dalam prioritas kegiatan *Smart Village* juga dijelaskan dalam pasal 7 yakni adanya tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Program *Smart Village* merupakan program adaptasi dari *Smart city*, program ini memfokuskan pada lingkup Pemerintah Desa karena secara karakteristik kota dengan desa berbeda dan secara kebutuhan infrastruktur sistem desa cerdas tidak serumit dengan program *Smart City*. Namun pada realitanya walaupun dibentuk sistem sederhana agar dapat terlaksana dengan mudah nampaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan sebab penerapan *Smart Village* pada pemerintahan desa banyak mengalami keterbatasan. Di provinsi Lampung sendiri program awal pelaksanaan *Smart Village* dilakukan pada 30 Desa yang disebut sebagai desa lokus *Pilot Project* penerapan *Smart Village* yang merupakan perwakilan dari 13 Kabupaten, kemudian di tahun 2021 secara berkala dilakukan penerapan diseluruh desa dengan catatan Desa yang akan melaksanakan akan dilakukan identifikasi terkait data-data Indeks Desa Membangun dan dilakukan observasi secara riil di lapangan siap atau tidaknya melaksanakan program *Smart Village*. Menurut Indrajit (2006) dalam menilai kesiapan penerapan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan dinilai berdasarkan 6 tahap yaitu ketersediaan sistem data, adanya landasan hukum yang jelas, adanya kelembagaan, ketersediaan sumber daya, infrastruktur teknologi, dan adanya kepemimpinan yang memiliki pemikiran yang strategis untuk mendukung penerapannya.

Banyak penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada desa yang yang menjadi *Pilot Project* Penerapan *Smart Village*, Desa Margototo dan Desa Margosari merupakan desa yang berupaya

mempersiapkan penerapan *Smart Village* namun bukan yang termasuk dalam 30 Desa yang sudah ditetapkan dalam *Pilot Project* penerapan *Smart Village* sehingga hal ini menarik untuk dianalisis bagaimana kesiapan penerapan dua desa ini yang berupaya mempersiapkan penerapan *Smart Village*.

Richard Heeks (2001) memberikan kerangka teori kesiapan dalam menilai suatu daerah dengan 6 indikator dengan memenuhi 6 indikator tersebut dianggap bahwa suatu daerah siap untuk melaksanakan penerapan *Smart Village* merupakan bentuk awal dari program *Smart Village*. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan *website* sebagai portal pelayanan yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk cara agar tercapai desa menjadi desa yang cerdas dengan pemanfaatan teknologi informasi, berikut dijabarkan terkait hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan 6 tahap kesiapan yakni sistem data, landasan hukum, kelembagaan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, kepemimpinan dan pemikiran yang strategis.

a. Sistem Data

Kesiapan dalam penerapan *Smart Village* diperlukan sistem data yang baik dalam artian bahwa Pemerintah Desa dalam pencatatan dan manajemen data sudah siap untuk menyokong penerapan *Smart Village*. Data yang dimaksud adalah tersedianya data kependudukan secara lengkap baik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan usia, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan, status domisili penduduk, data keuangan maupun data atau dokumen desa lainnya yang sudah tersedia di kantor desa dan yang paling utama adalah ketersediaan data kependudukan secara digital yang mana diketahui bahwa dalam penerapan *Smart Village* diperlukan data-data kependudukan karena hal ini sangat penting untuk proses pelayanan online yang merupakan upaya pemerintah desa memberikan pelayanan publik secara digital. Lebih lanjut, diketahui bahwa Pemerintah Desa Margototo belum memiliki sistem data yang terstruktur terutama dalam pencatatan digital terkait data kependudukan sebagai *database* dalam *website* untuk merealisasikan pelayanan secara digital. Diketahui bahwa pencatatan masih dilakukan secara konvensional, hal ini terlihat dari kurang lengkapnya informasi yang disajikan dalam *website* Desa Margototo baik itu terkait kependudukan maupun transparansi keuangan desa.

Minimnya ketersediaan data yang disajikan dalam *website* Desa Margototo disebabkan karena kendala pemerintah desa tentang ketidakmampuan aparatur dalam penggunaan komputasi. Berdasarkan observasi diketahui bahwa dokumen-dokumen kependudukan diperoleh dari masing-masing Kepala Dusun (Kadus) yang ada di Desa Margototo namun ternyata dari Kepala Dusun yang ada hanya 2 orang saja yang mampu dan memiliki kemampuan komputasi dasar sedangkan lainnya diketahui tidak dapat mengoperasikannya, sehingga beberapa pekerjaan ini dibebankan kepada Operator website hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Toots (2019) yang meneliti kegagalan penerapan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan di Negara Estonia akibat dari kurang jelasnya pembagian kerja, integrasi data yang buruk, dan kondisi budaya yang tidak mendukung hal ini serupa dengan kondisi yang terjadi pada Pemerintah Desa Margototo menunjukkan ketidaksiapan dalam indikator sistem data.

Sedangkan pada Pemerintah Desa Margosari sistem data terlihat sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Desa Margosari hal ini dibuktikan dengan sudah dilakukannya pencatatan dokumen secara digital khususnya untuk *database* kependudukan yang sudah terintegrasi pada *website* untuk penerapan pelayanan publik secara digital. Demikian bahwasannya Pemerintah Desa Margosari terlihat lebih siap dalam penerapan *Smart Village* karena terlihat dari sistem data yang sudah dipersiapkan dan pembentukannya *database* yang sudah diintegrasikan ke *website* untuk mewujudkan pelayanan digital. Jika dilihat berdasarkan *website* yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Margosari sudah pada tahap *Interact* jika mengacu pada 3 proyek *E-Government* menurut (Indrajit, 2006) yang merupakan penggunaan *website* yang sudah pada tahap adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dikatakan demikian sebab sudah adanya fitur pengaduan yang dapat digunakan sehingga memungkinkan dapat berdiskusi secara langsung dengan aparatur desa.

b. Landasan Hukum

Berdasarkan wilayah Pemerintah Desa Margototo dan Desa Margosari merupakan Desa pada wilayah yang sama yakni di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, sehingga peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan *Smart Village* merupakan aturan yang sama yakni Peraturan Gubernur No 18 Tahun 2021. Namun ditahun sebelumnya juga sudah ada peraturan yang mengatur hal yang sama terkait penggunaan sistem informasi desa yakni Undang-Undang No 06 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati No 60 Tahun 2017 hanya saja memang pelaksanaannya tidak maksimal akibat dari kerusakan sistem website kemudian adanya program baru Desa Berjaya yang mana dalam program tersebut mengatur terkait pelaksanaan Desa Cerdas atau *Smart Village*. Secara umum memang sama dalam pelaksanaannya yaitu memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan. Alih alih memperbaiki implementasi terkait peraturan sebelumnya yang belum optimal justru hal ini menunjukkan peraturan yang kurang fokus sehingga hanya pergantian nama program tanpa perbaikan nyata di lapangan.

c. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan salah satu indikator penting yang perlu dipersiapkan untuk mendukung penerapan *Smart Village* sebab dalam upaya penerapannya diperlukan suatu lembaga atau unit yang mengkoordinir dan mendampingi. Dalam mengadopsi teknologi informasi dalam sistem pemerintahan terutama dalam skala desa diharuskan memiliki pendampingan secara langsung karena penerapan pada tingkat Pemerintah Desa rentan mengalami kegagalan sebab pengaruh utamanya adalah kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari SDM yang dimiliki demikian penting adanya pendampingan secara langsung oleh pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Desa Margototo belum adanya unit yang mengkoordinir secara langsung di Desa, Pemerintah Desa terkesan menyerahkan tugas untuk mengkoordinir dengan Pendamping Desa. Padahal secara tugas Pendamping Desa bukan bertanggung jawab untuk mengkoordinir pelaksanaan *Smart Village*, jika mengacu pada peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 bahwa Pendamping Desa hanya bertugas dalam mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hal ini sebenarnya merupakan salah satu kelemahan dari adopsi inisiatif pemanfaatan teknologi informasi pada sistem pemerintahan terutama pada Pemerintah Desa karena seringkali dalam perencanaan awal untuk membentuk Desa digital tidak memperhatikan pembentukan kelembagaan yang dapat mendampingi langsung sehingga jika dalam pelaksanaannya mengalami kendala Pemerintah Desa dapat memperoleh penanganan secara langsung dan cepat seperti halnya pada hasil penelitian (Mayowan, 2019) yang menunjukkan bahwa pada aspek kelembagaan untuk menyukseskan *Smart Village* pada Pemerintah Desa memang harus adanya pembentukan lembaga yang secara khusus mendampingi desa tentunya yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pengembangan website hal ini sebagai bentuk dari fasilitas pemerintah agar pelaksanaan *Smart Village* pada Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan Hasil yang sama diperoleh antara Pemerintah Desa Margosari dan Desa Margototo bahwasannya memang belum adanya lembaga atau unit yang dapat mengkoordinir pelaksanaan *Smart Village*. Pembentukan lembaga yang mengkoordinir hanya ada ditingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi. Tidak adanya unit/lembaga yang dibentuk untuk secara langsung mendampingi desa, hal serupa juga ditemui dalam hal ini Pemerintah Desa membebankan kepada Pendamping Desa. Pendamping Desa berperan sebagai perpanjangan tangan dari unit/lembaga yang ada di Kecamatan sehingga dalam koordinasi *website* dan semacamnya dilimpahkan ke Pendamping Desa.

Unit atau lembaga yang dibentuk untuk mengkoordinir terlihat kurang efektif karena terlalu banyak pembentuk yang dilakukan pada tiap tingkatan sehingga dalam membantu pendampingan Desa tidak begitu maksimal, hal ini terlihat bahwa dalam proses pelaporan kerusakan *website* terlalu bertele tele sebab agar laporan tersebut dapat ditangani pada pihak tim

Kabupaten harus terlebih dahulu melalui pendampingan desa dan tim kecamatan, hal ini memang nampak kurang efektif dalam membantu Pemerintah Desa. Padahal secara idealnya ketersediaan lembaga yang bertanggung jawab bukan hanya sekedar mengarahkan tetapi dapat mengkoordinir dengan baik jalannya program sehingga tidak adanya perbedaan hasil dari satu daerah dengan daerah lainnya. Namun adanya perbedaan dimana Pemerintah Desa Margosari memiliki Posyantekdes (Pos layanan Teknologi Tepat Guna Desa) sehingga dalam pelaksanaannya cukup lebih baik sebab karena memang ada unit yang dibentuk desa untuk membantu pemanfaatan teknologi informasi pada desa dan membantu juga pemanfaatan teknologi pada masyarakat.

d. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia merupakan bagian komponen yang penting dan perlu dipersiapkan untuk mendukung keberhasilan *Smart Village*. Bukan hanya ketersediaan tetapi juga diperlukannya kemampuan yang mumpuni baik secara kompetensi maupun kemampuan teknis untuk memahami teknologi informasi sehingga dapat menyelaraskan tujuan yakni membantu pembangunan dan mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pada Pemerintah Desa Margototo berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya ada satu pengelola *website* desa yaitu Operator Desa. Secara kemampuan kompetensi dalam pengelolaan *website* kurang mumpuni hal ini terlihat dari *website* desa yang kurang informatif ada beberapa hal yang mempengaruhi hal ini yaitu karena Operator Desa mengelola sendiri *website* Desa sehingga mengalami keterlambatan dalam *entry data*, penyebab lain adalah adanya kemungkinan karena kompleksitas teknis dari *website* yang kurang dipahami sehingga mempengaruhi pengembangan *website* terlebih lagi secara pendidikan Operator Desa bukan dari latar belakang TI (Teknologi Informasi).

Secara kemampuan teknis Operator Desa sebagai pengelola *website* sudah cukup jika sebatas dalam penggunaan perangkat keras (*Hardware*), namun secara keterampilan menangani permasalahan pada perangkat operator Desa Margototo masih belum memiliki kemampuan tersebut, selain itu kemampuan untuk mengelola dan konten *website*, *database*, dan integrasi pada media sosial belum terlihat karena berdasarkan hasil penelitian bahwa Operator Desa Margototo menyadari ketidakahirannya dalam pengelolaan *website*. Padahal semestinya sebagai Operator Desa terutama sebagai admin *website* memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan *website* seperti pada pengelolaan konten *website* untuk memperbaharui, pemeliharaan rutin, serta memastikan keberlanjutan *website*, dan yang paling dasar adalah pemahaman pada bagaimana *website* berfungsi sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, keberadaan *website* bukan hanya sekedar memiliki saja namun ada kebermanfaatan yang diperoleh, terlebih lagi bahwa Pemerintah Desa Margototo berencana untuk melakukan pelayanan pada portal *website* seharusnya selaku Operator Desa sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan *website* semestinya dapat dengan baik menjalankan tugas yang telah diberikan.

Sedangkan hasil berbeda ditemukan bahwa Pemerintah Desa Margosari sudah sangat mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang cukup mumpuni untuk menyukseskan pelaksanaan *Smart Village* yakni dengan memperhatikan latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi (TI). Hal ini bertujuan agar saat pengelolaan *website* tidak mengalami kendala sebab SDM yang dipersiapkan cukup ahli dibidangnya. Pemerintah Desa Margosari menyiapkan 7 Anggota pengelola *website* yang terdiri dari 1 Operator *website*, 3 orang untuk tim publikasi, dan 3 orang untuk tim Administrator. Hal ini menjadi poin lebih Pemerintah Margosari di bandingkan Pemerintah Desa Margototo, nampak bahwa sangat dipersiapkan dalam upaya menerapkan *Smart Village*. Pemerintah Desa Margosari menunjukkan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam mendukung suatu program agar dapat berhasil diterapkan. Terlebih lagi secara latar belakang pendidikan yang sangat diperhatikan dalam mencari SDM yang dibutuhkan karena memang dalam melakukan pengembangan *website* memang harus memiliki pemahaman dan kompetensi terkait sistem informasi. Berikut merupakan rincian pengelola *website* Desa Margosari.

Tabel. 1 Pengelola Website Desa Margototo

| No | Nama | Posisi | Pendidikan |
|----|-------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Ulfa Lailatin | Operator Desa/Admin Panel Website | SMK-TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) |
| 2 | Fina Septiana | Publikasi | SMK-TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) |
| 3 | Bayu Saputra | Tim Publikasi | SMK-TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) |
| 4 | Bagus Wahyudi | Tim Publikasi | SMK-TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) |
| 5 | Annisa Nur O | Administrator | SMK-TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) |
| 6 | Fidya Kurniawati | Tim Administrator | SMK-TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) |
| 7 | Rafi Yusuf Wijaya | Tim Administrator | SMK-TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) |

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

e. Infrastruktur Teknologi

Ketersediaan infrastruktur teknologi memiliki peran pendukung 50% dari keberhasilan, sebab dalam upaya mempersiapkan *Smart Village* memerlukan infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni untuk menyokong keberhasilan dalam penerapannya (Indrajit,2006). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pemerintah Desa Margototo telah memenuhi pada indikator ini baik secara keseluruhan Desa telah memiliki jaringan internet merata sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengakses, selain itu Kantor Desa didukung dengan sudah tersedianya wifi, dilakukannya instalasi *wifi* untuk mendukung kinerja Operator Desa mengembangkan website selain itu juga untuk memfasiltasi aparatur lainnya dalam menunjang kinerja masing-masing. Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan juga menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Margototo sudah mempersiapkan anggaran agar *website* dapat terus berkelanjutan,hal ini cukup membuktikan adanya keseriusan Pemerintah Desa Margototo dalam upaya untuk menerapkan *Smart Village*. Berikut rincian anggaran yang dikeluarkan untuk keberlanjutan *website* Desa Margototo.

Tabel. 2 Pengadaan Infrastruktur Smart Village

| No | Uraian | Volume | Jumlah |
|--------------|--|---------|----------------------|
| 1 | Instalasi perangkat keras | 1 paket | Rp 1.850.000 |
| 2 | <i>Setup, configuration, Maintenance</i> | 1 tahun | Rp 3.900.000 |
| 3 | <i>Visitasi, Guide, Online Support</i> | 1 tahun | Rp 2.220.000 |
| 4 | <i>Premium informasi system + Thema</i> | 1 paket | Rp 1.375.000 |
| 5 | <i>Integrated Management System</i> | 1 paket | Rp 1.925.000 |
| 6 | <i>Unlimited Hosting</i> | 1 paket | Rp 2.035.000 |
| 7 | Pelatihan | 1 orang | Rp 3.000.000 |
| Total | | | Rp 16.305.000 |

Sumber: Sistem Keungan Desa Margototo, 2022

Tabel. 3 Anggaran Maintenance Website

| No | Uraian | Volume | Jumlah |
|--------------|--|---------|---------------------|
| 1 | <i>Visitasi, Guide, Online Support</i> | 1 tahun | Rp 1.200.000 |
| 2 | <i>Sewa Hosting</i> | 1 tahun | Rp 1.850.000 |
| 3 | <i>Maintenance, update system, backup, restore, security</i> | 1 paket | Rp 700.000 |
| 4 | Pelatihan | 2 orang | Rp 6.000.000 |
| Total | | | Rp 9.750.000 |

Sumber: Sistem Keungan Desa Margototo, 2023.

Berdasarkan tabel yang telah dijabarkan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Margototo sudah sangat siap hal ini dapat dilihat secara lokasi Desa Margototo sudah meratanya jaringan

internet, Pemerintah Desa melakukan pengadaan barang, anggaran yang disiapkan untuk pengembangan, pemeliharaan, dan pelatihan yang dianggarkan dari Dana Desa pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dalam menerapkan *Smart Village*. Pada Desa Margosari juga ditemukan hal serupa bahwa ketersediaan infrastruktur teknologi sudah disiapkan tidak hanya anggaran tetapi juga dengan melakukan perluasan jaringan internet dengan menginstalasi *wifi* di 4 titik berbeda di desa yakni pada kantor desa dan 3 lainnya di masing-masing rumah aparaturnya.

Tabel. 4 Pengadaan Infrastruktur *Smart Village*

| No | Uraian | Volume | Jumlah |
|--------------|--|---------|----------------------|
| 1 | Instalasi perangkat keras | 1 Paket | Rp 1.850.000 |
| 2 | <i>Setup, configuration, Maintenance</i> | 1 tahun | Rp 3.900.000 |
| 3 | <i>Visitasi, Guide, Online Support</i> | 1 Tahun | Rp 2.220.000 |
| 4 | <i>Premium informasi system + Thema</i> | 1 paket | Rp 1.375.000 |
| 5 | <i>Integrated Management System</i> | 1 paket | Rp 1.925.000 |
| 6 | <i>Unlimited Hosting</i> | 1 Paket | Rp 2.035.000 |
| 7 | Pelatihan | 1 Orang | Rp 3.000.000 |
| Total | | | Rp 16.305.000 |

Sumber: Dana Desa Margosari, 2022

Tabel. 5 Anggaran *Maintenance Website*

| No | Uraian | Volume | Jumlah |
|--------------|--|---------|----------------------|
| 1. | <i>Visite Guide, Online Support</i> | 1 Tahun | Rp 1.200.000 |
| 2. | Sewa Hosting | 1 Tahun | Rp 1.850.000 |
| 3. | <i>Maintenance, update system, backup, restore, security</i> | 1 Paket | Rp 700.000 |
| 4. | Pelatihan | 1 Orang | Rp 3.000.000 |
| 5. | Wifi | 1 Tahun | Rp 4.800.000 |
| Total | | | Rp 11.550.000 |

Sumber : Dana Desa Margosari, 2023

Berdasarkan tabel yang telah dijabarkan secara detail menunjukkan hasil yang sama bahwa memang antara Pemerintah Desa Margototo dan Pemerintah Desa Margosari pada indikator ketersediaan infrastruktur teknologi sudah dipersiapkan dengan baik secara anggaran maupun infrastruktur yang mendukung hal ini menunjukkan komitmen dari kedua desa untuk dapat berhasil menerapkan *Smart Village* terutama dalam membantu akses pelayanan melalui portal *website* desa. Namun yang menjadi perbedaan terlihat dari Pemerintah Desa Margosari berupaya memberikan perluasan akses dengan adanya beberapa instalasi *wifi* di 4 titik di desa, sehingga masyarakat dapat terbantu terutama dalam penggunaan internet. Karena infrastruktur teknologi memiliki peran cukup besar sehingga perlu penyediaan yang maksimal pada indikator ini terlihat bahwa Pemerintah Desa Margosari sangat memaksimalkan sumber daya yang ada yang terbukti pada perluasan akses internet yang dilakukan sangat membantu akses masyarakat. Sebab dari beberapa penelitian terdahulu yang menjadi kendala dalam penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan adalah kurangnya akses internet sehingga hal ini sulit di terapkan.

Jika Mengacu dalam teori komponen teknologi informasi menurut Syarif Hidayatullah (2021:4) adanya 3 komponen penting yang saling mempengaruhi dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu adanya perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Perangkat lunak dan perangkat keras dapat dikatakan sebagai infrastruktur yang perlu dipersiapkan yang kemudian perangkat tersebut perlu manusia sebagai penggerak infrastruktur tersebut sehingga sudah semestinya memang diperlukan untuk mempersiapkan dengan baik infrastruktur yang dibutuhkan dalam menunjang *Smart Village*, kesiapan yang terlihat pada Pemerintah Desa Margosari merupakan komitmen yang dibentuk agar dapat segera terealisasikan pelayanan melalui portal *website*.

f. Kepemimpinan Dan Pemikiran Yang Strategis

Kepala Desa selaku pemimpin dalam skala Pemerintah Desa memiliki peran yang krusial dalam mendorong penerapan *Smart Village*, dalam indikator ini diperlukan sikap kepemimpinan dan pemikiran yang strategis untuk menyokong keberhasilan program ini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemimpin yakni Kepala Desa Margototo sangat menyadari pentingnya menerapkan *Smart Village* pada penyelenggaraan pemerintah desa, adanya dukungan dari Kepala Desa Margototo yaitu dengan disediakan anggaran yang berasal dari dana desa untuk pengembangan dan pemeliharaan *website*. namun untuk strategi agar Pemerintah Desa dapat segera menerapkan *website* sebagai portal pelayanan belum terlihat walaupun Kepala Desa telah mendukung dengan memberikan motivasi, menyediakan perangkat yang diperlukan, dan menampung keluhan dari aparatur lain.

Komitmen belum terlihat pada Kepala Desa Margototo dalam pengembangan *website* karena terlihat bahwa dari *website* Desa Margototo yang masih hanya sebatas penyedia informasi saja dan tidak adanya pengembangan yang dilakukan. Dengan demikian terlihat bahwa walaupun seorang pemimpin telah memberikan dukungan secara material tetapi jika tidak adanya komitmen serta tujuan yang jelas dari rencana yang telah ditentukan tentu tidak akan dapat terealisasi, dan berdasarkan hasil yang telah dijabarkan sebelumnya terkait permasalahan keterlambatan penginputan data kependudukan belum adanya solusi konkrit yang diberikan oleh Kepala Desa.

Dengan demikian artinya terdapat pengaruh Kepemimpinan dan pemikiran yang strategis dari persiapan *Smart Village* di Pemerintah Desa Margototo hal itu terlihat dari belum adanya komitmen dan konsisten agar *website* dapat terus dilakukan pengembangan hingga pada tahap pelayanan dan hal ini juga mempengaruhi *website* yang ada masih sebatas memberikan informasi saja, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa Kepala Desa Margototo hanya sekedar berusaha menerapkan saja tanpa adanya perkembangan lebih karena berdasarkan indikator sebelumnya nampak bahwa memang adanya peraturan yang mengharuskan menerapkan padahal dari sisi masyarakat Desa Margototo tidak begitu membutuhkan adanya inovasi tersebut.

Hasil berbeda ditemukan bahwa pada indikator ini terlihat Kepala Desa Margosari sangat baik dalam memotivasi dan mendukung kesiapan *Smart Village* tidak hanya dukungan pada Aparatur Desa tetapi juga dukungan kepada masyarakat. Dalam memotivasi aparatur, Kepala Desa Margosari memiliki cara tersendiri nampak seperti pemberian fasilitas kepada salah satu aparatur desa untuk menunjang kinerjanya seperti dilakukan instalasi *wifi* di 4 titik desa untuk menunjang aparatur desa dalam bekerja sehingga tidak hanya terpatok dalam Kantor Desa karena sudah difasilitasi juga pada beberapa aparatur desa memanfaatkan internet dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan fasilitas yang sudah disediakan.

Kepala Desa Margosari memiliki cara-cara tersendiri dalam memotivasi dan mendukung persiapan *Smart Village* di Desa Margosari, hal ini terlihat dalam mensosialisasikan dan menginformasikan rencana terkait pelayanan melalui *website* dengan metode dari mulut ke mulut bukan dengan melakukan perkumpulan secara resmi, cara ini dinilai efektif terutama untuk masyarakat yang kurang memahami teknologi karena merupakan media komunikasi yang sejak dahulu diwariskan oleh masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menerima dengan baik informasi yang disampaikan.

Metode penyebaran tersebut dalam Bahasa Jawa disebut dengan *Gethok Tular* merupakan metode penyebaran dari mulut ke mulut hal ini terlihat efektif sebab terlihat dari masyarakat yang memahami terkait *Smart Village*. Metode unik yang digunakan ini memiliki keterkaitan dari budaya karena diketahui berdasarkan data kependudukan hampir 90% penduduk desa Margosari bersuku Jawa sehingga metode ini merupakan langkah yang baik dilakukan oleh Kepala Desa sehingga terlihat dari dampaknya masyarakat banyak yang mengetahui dan memahami dari program *Smart Village*.

Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan bahwa secara indikator Kepemimpinan dan pemikiran strategis dari Kepala Desa Margosari sangat terlihat baik dari pemberian dukungan, fasilitas, dan cara mensosialisasikan terkait *Smart Village* dengan melihat kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat desa sehingga terlihat bahwa pemimpin dan ide strategis yang

ditunjukkan sangat mendorong kesiapan penerapan *Smart Village* pada Pemerintah Desa Margosari.

PENUTUP

Kesiapan Penerapan *Smart Village* Pada Pemerintah Desa di Desa Margototo dan Desa Margosari terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan pada setiap Indikator *E-Readiness*. Pada Pemerintah Desa Margototo nampak bahwa dari 6 indikator kesiapan hanya pada indikator Infrastruktur Teknologi yang sudah dipersiapkan dengan baik dengan disediakannya peralatan yang dibutuhkan untuk penerapan *Smart Village*. Ketidaksiapan terlihat dari belum tersedianya sistem data yang mendukung untuk pelayanan digital, adanya landasan hukum tetapi kurang dalam pengawasan dan pendampingan sehingga pelaksanaan di Desa mengalami banyak kendala, tidak adanya kelembagaan yang jelas dalam mengkoordinir pelaksanaan *Smart Village* di Desa, ketidaksiapan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Margototo dalam mengelola *website* desa turut menjadi permasalahan dalam keberhasilan penerapan program *Smart Village* dan kurangnya inisiatif Kepala Desa Margototo dalam mendorong kesiapan penerapan *Smart Village*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Margototo belum siap dalam menerapkan program Desa Cerdas atau *Smart Village*.

Hasil yang berbeda ditemukan pada Pemerintah Desa Margosari dapat sedikit lebih unggul dibandingkan Pemerintah Desa Margototo, sebab dari 6 Indikator Pemerintah Desa Margosari dapat memenuhi 4 Indikator yakni ketersediaan sistem data yang sudah diintegrasikan dengan *website* desa, ketersediaan sumber daya yang mumpuni dengan adanya 7 anggota pengelola *website* dengan pembagian tugas yang jelas, ketersediaan infrastruktur teknologi dengan menyediakan peralatan serta instalasi *wifi* di 4 titik desa, dan kepemimpinan Kepala Desa Margosari yang cukup baik dalam memahami pentingnya *Smart Village*, bukan hanya mempersiapkan aparatur desa tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan menggunakan metode kearifan lokal yang berhasil diterapkan. Ketidaksiapan terlihat pada indikator yang sama pada Pemerintah Desa Margototo yaitu Landasan Hukum dan kelembagaan yang menjadi permasalahan utama di kedua desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayatullah, S. (2021). *Teknologi Informasi dan Komunikasi* (S. Hidayatullah, Ed.; 1st ed.). TareBooks.
- Hiro, I. (2019). *Kesiapan Penerapan e-Government pada Pemerintah Desa*. Universitas Lampung.
- Heeks, R. (2001). *Understanding e-Government for Development*. Institute for Development Policy and Management University of Manchester.
- Indrajit, R. E., Rudianto, D., & Zainuddin, A. (2006). *e-Government in Action* (1st ed.). Yogyakarta: ANDI.
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2015). Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Masyarakat Desa.
- Kurniawan, B. (2021). *Kesiapan Pemerintah Desa dalam Penerapan Smart Village di Provinsi Lampung Tahun 2021*. Universitas Lampung
- Mayowan,.Y. (2019). Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1), 14-23.
- Muhadjir, N. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nugroho, (2020). *Pengaruh Pelatihan, Motivasi, Kompetensi Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia*, Universitas Islam Sultan Agung.
- Toots, M. (2019). Why E-Participation Systems Fail: The Case Of Estonia's. *Government Information Quarterly*, 36 (3), 546-559.

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Lampung Timur.

Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Program Desa Berjaya.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Website Desa Margototo. <https://Margototo-desa.id>, diakses pada 19 September 2023.

Website Desa Margosari. <https://Margosari-desa.id>, diakses pada 26 Agustus 2023.